

No. Daftar FPIPS: 1103/UN40.A2.9/PP/2019

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DALAM MEMBANGUN KETERTIBAN SOSIAL DI KAWASAN
MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG**

SKRIPSI

**diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan Departemen Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



oleh

INDRIA DESTI

NIM 1505297

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

2019

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DALAM MEMBANGUN KETERTIBAN SOSIAL DI KAWASAN
MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG

Oleh:

INDRIA DESTI

Sebuah skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan pada Departemen Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

©Indria Desti 2019

Universitas Pendidikan Indonesia

Juni 2019

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian, dengan dicetak
berulang-ulang, difotokopi, atau cara lainnya tanpa izin dari penulis.

INDRIA DESTI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DALAM MEMBANGUN KETERTIBAN SOSIAL DI KAWASAN
MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG

disetujui dan disahkan oleh pembimbing:

Pembimbing I



Drs. H. Eded Tarmedi, MA.

NIP. 19580105 198002 1 002

Pembimbing II

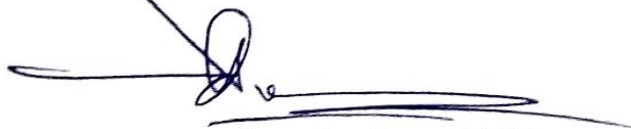


Drs. H. Faqih Samlawi, MA.

NIP. 19600408 198803 1 001

Mengetahui

Ketua Departemen Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



Dr. H. Dadang Sundawa, M.Pd.

NIP. 19600515 198803 1 002

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM MEMBANGUN KETERTIBAN SOSIAL DI KAWASAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG

Indria Desti (1505297)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang timbul akibat keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati ruang publik. Aktivitas PKL yang berjualan di trotoar maupun pinggir jalan sekitar kawasan Majalaya dirasa mengganggu ketertiban sosial seperti mengganggu kelancaran lalu lintas, dan terkesan para PKL yang kurang tertata. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima dalam membangun ketertiban sosial di kawasan Majalaya Kabupaten Bandung. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Partisipan penelitian diantaranya Satpol PP Kecamatan Majalaya, beberapa PKL di Alun-alun Majalaya, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan beberapa hal diantaranya: 1) kondisi PKL sebelum dilakukan penataan memang kurang tertib, kurang pas sehingga mengurangi kenyamanan para pejalan kaki, mengganggu jalannya lalu lintas, dan tidak sedikit PKL yang membangun bangunan liar di sepanjang jalur Majalaya, hal tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi yang mengharuskan PKL memenuhi kebutuhan hidupnya; 2) Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu menata, membina dan menertibkan para PKL sesuai Perda No. 5 Tahun 2015 dengan pendekatan persuasif memberikan pemahaman maupun motivasi yang baik. Berhubung tempat untuk menampung para PKL belum ada terpaksa ada kebijakan khusus yaitu para PKL untuk sementara berjualan di halaman toko yang juga atas izin pemilik toko tersebut. Kemudian dari pihak Desa mengizinkan membuat tempat sementara untuk para PKL di dekat Terminal Majalaya dan membongkar bangunan liar milik PKL yang terdapat di sekitar jalur Majalaya karena selain mengganggu ketertiban juga menghalangi loyalitas kepentingan umum; 3) hasil implementasi kebijakan penataan PKL ini belum maksimal meskipun sudah diimplementasikan secara merata di kawasan Majalaya akan tetapi penilaian terhadap pelaksanaannya belum sampai 100%. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya seperti belum adanya lokasi yang layak untuk menampung semua PKL, faktor ekonomi, lokasi Alun-alun yang ramai dan mudah dijangkau sehingga para PKL cenderung mengabaikan aturan.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, penataan pedagang kaki lima, ketertiban sosial.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF STREET VENDORS ARRANGEMENT POLICY IN BUILDING SOCIAL DISCIPLINES IN MAJALAYA REGION OF BANDUNG REGENCY

Indria Desti (1505297)

This research is motivated by problems arising from the presence of street vendors (PKL) whom occupy public spaces. The street vendors whom actively doing their business in public spaces such as sidewalks, and roadsides are considered disturbing the social disciplines because they disturb traffic flow, and are tend to be messy when doing their business. This study aims to describe and analyse the implementation of a street vendor arrangement policy in building social disciplines in the Majalaya region of Bandung Regency. This research was conducted using a qualitative approach with a descriptive method. Research participants included the Satpol PP Majalaya District, several street vendors in Majalaya Square, and the residents of Majalaya. The data in this research were being obtained by using several techniques: observation, interviews, and documentation studies. The results of the study show several information as follow: 1) the condition of street vendors before the arrangement was done was not orderly enough, they have reduced pedestrian comfort, disrupted traffic, and there are numerous street vendors built illegal buildings along the Majalaya route, it is caused by economic factors that require the street vendors to fulfill its life needs; 2) Efforts made by the Satpol PP are to organize, build and set in order the street vendors according to Perda No. 5 2015 with a persuasive approach to share good understanding and motivation. Since there was no place to accommodate street vendors, there was a special policy that allows the street vendors to temporarily sell in the shop yards which was licensed by the shop owners. Then, the village officials gave the permission to the street vendors to open their shops near the Majalaya Terminal and dismantled illegal street vendors buildings around the Majalaya route because aside to disturbing the order, it also discomfort to the public; 3) the results of the implementation of the street vendor arrangement policy have not been maximized even though it has been carried out evenly in the Majalaya region. But, the evaluation of its implementation has not reached 100%. This is because there are still shortcomings in its implementation such as the absence of proper locations to accommodate all street vendors, economic factors, the location of a bustling square and easily reachable so that the street vendors tends to ignore that rules.

Keywords: *Policies implementation, Street vendors arrangement, Social discipline.*

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERNYATAAN	i
KATA PENGANTAR	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Struktur Organisasi Skripsi	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Kajian tentang Kebijakan Publik	9
2.1.1 Definisi Kebijakan Publik	9
2.1.2 Analisis Kebijakan Publik	11
2.1.3 Unsur dan Dimensi Kebijakan Publik	12
2.2 Kajian tentang Implementasi Kebijakan	13
2.2.1 Definisi Implementasi Kebijakan	13
2.2.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan	14
2.3 Kajian tentang Penataan Pembinaan dan Penertiban	14
2.3.1 Penataan	14
2.3.2 Pembinaan	15
2.3.3 Penertiban	16
2.4 Kajian tentang Pedagang Kaki Lima	17

2.5 Kajian tentang Model Penataan, Pembinaan dan Penertiban di Daerah dan Negara lain	19
2.5.1 Kota Bandung	19
2.5.2 Solo	20
2.5.3 Jambi	21
2.5.4 Bangkok	22
2.6 Kajian tentang Ketertiban Sosial	22
2.6.1 Ketertiban Sosial	18
2.6.2 Struktur Sosial	24
2.6.3 Pengendalian Sosial	25
2.7 Keterhubungan Implementasi Kebijakan Penataan PKL dalam Membangun Ketertiban Sosial dengan Pembelajaran IPS	29
2.8 Penelitian Terdahulu	31
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Desain Penelitian	35
3.1.1 Pendekatan Penelitian	35
3.1.2 Metode Penelitian	36
3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian	37
3.2.1 Partisipan Penelitian	37
3.2.2 Tempat Penelitian	38
3.3 Teknik Pengumpulan Data	39
3.3.1 Observasi	39
3.3.2 Wawancara	40
3.3.3 Studi Dokumentasi	41
3.4 Teknik Analisis Data	41
3.4.1 Reduksi Data	42
3.4.2 Penyajian Data	42
3.4.3 Kesimpulan/Verifikasi	43
3.5 Tahap-tahap Penelitian	44
3.5.1 Tahap Pra Penelitian	44
3.5.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian	44
3.6 Uji Keabsahan Data	45

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Deskripsi Umum Partisipan dan Tempat Penelitian	48
4.1.1 Partisipan Penelitian	48
4.1.1.1 Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.....	48
4.1.1.1.1 Profil Satpol PP Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.....	48
4.1.1.1.2 Visi dan Misi Satpol PP Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung	49
4.1.1.1.3 Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Satpol PP Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung	49
4.1.1.1.4 Wewenang, Hak, Kewajiban, dan Tugas Pokok Satpol PP Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung	50
4.1.1.1.5 Susunan Organisasi Satpol PP Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung	51
4.1.2 Tempat Penelitian	52
4.2 Deskripsi Temuan Penelitian	53
4.2.1 Hasil Observasi	53
4.2.2 Hasil Wawancara	54
4.2.2.1 Kondisi Umum Ketertiban Sosial Pedagang Kaki Lima sebelum dilakukan Penataan di Kawasan Majalaya Kabupaten Bandung	55
4.2.2.2 Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satpol PP terkait Proses Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Membangun Ketertiban Sosial di Kawasan Majalaya Kabupaten Bandung	58
4.2.2.3 Hasil dari Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Membangun Ketertiban Sosial di Kawasan Majalaya Kabupaten Bandung	64
4.2.3 Hasil Studi Dokumentasi	72
4.3 Pembahasan Temuan Penelitian	78

4.3.1	Kondisi Umum Ketertiban Sosial Pedagang Kaki Lima sebelum dilakukan Penataan di Kawasan Majalaya Kabupaten Bandung	78
4.3.2	Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satpol PP terkait Proses Penataan Pedagang Kaki lima dalam Membangun Ketertiban Sosial di Kawasan Majalaya Kabupaten Bandung	81
4.3.3	Hasil dari Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Membangun Ketertiban Sosial di Kawasan Majalaya Kabupaten Bandung	90
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI		103
5.1	Simpulan	103
5.2	Implikasi	105
5.3	Rekomendasi	105
DAFTAR PUSTAKA		xiv
LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, F. & Alam, A. S. (2012). *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama.
- Anwar, Y. & Adang. (2013). *Sosiologi untuk Universitas*. Bandung: Refika Aditama.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Danial & Wasriah. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Dunn, William. N. (2000). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fathoni, Adburrahmat. (2006). *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fermana, Surya. (2009). *Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofis*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media.
- Hamilton, Peter. (1990). *Talcott Parsons dan Pemikirannya Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Hidayat, S. (1979). *Pembinaan Perkotaan di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Horton, P. B. & Hunt, C. L. (1984). *Sosiologi Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.
- Kusumohamidjojo, Budiono. (1999). *Ketertiban Yang Adil*. Jakarta: Grasindo.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Narwoko, D. & Suyanto, B. (2011). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Novra, Ardi. (2014). *Program Penataan dan Pemberdayaan Kelompok Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) Kota Jambi*. Pemerintah Kota Jambi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- Sapriya. (2009). *Pendidikan IPS Konsep dan Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Setiadi, E. & Kolip, U. (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soekanto, S. & Sulistyowati, B. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2012). *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal

- Hanifah & Mussadun. (2014). *Penilaian Tingkat Keberhasilan Relokasi PKL Di Kawasan Pasar Waru Dan Simpang Lima, Semarang*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota vol. 25, No. 3, hlm. 228-242.
- Harsan, I. W. (2017). *Studi tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pasar di Pasar Segiri Kota Samarinda*. E-journal Ilmu Pemerintahan, 5 (1); 145-158.
- Liana, R. M. V. (-). *Implementasi Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang (Studi kasus Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Kota Semarang)*. Ilmu Pemerintahan.

- Maarisit, dkk. (2014). *Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado*. Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan Edisi X I.
- Mutawwali, M. I. (2017). *Implementasi Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-431/2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Lapangan Merdeka Balikpapan Dalam Rangka Penataan Ruang Kota*. Ejournal Administrasi Negara, Volume 5, Nomor 3.
- Nofianti, dkk. (2019). *Peran Dinas Pasar dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Sungai Dama Kota Samarinda*. E-jurnal Ilmu Pemerintahan, 7 (1): 493-506.
- Suneth & Ismanto. (2014). *Implementasi Kebijakan Publik Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Studi Di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo*. JKMP, vol.2, No. 1, Maret 2014, 1-102.

Skripsi

- Hodijah, E. S. (2016). *Ketertiban Sosial Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar (Studi Kasus pada Pasar Plered, Kabupaten Purwakarta)*. Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia. Tidak diterbitkan.
- Najib, M. A. (2012). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang "Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima"*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Tidak diterbitkan.
- Sartika, E. W. (2011). *Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tidak diterbitkan.
- Sholekah, N. I (2017). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-alun*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Tidak diterbitkan.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Internet

Badan Pusat Statistik. 2016. *71% Usaha Non Pertanian Indonesia Kategori Kaki Lima dan Pedagang Keliling*. [Online] available at: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/26/70-usaha-di-indonesia-kategori-kaki-lima-dan-pedagang-keliling> [Diakses 15 Agustus 2019].

Humas Kota Bandung. *Berburu Ilmu ke Kota Bandung, Wakil Wali Kota Palopo Boyong Seluruh Camat*. [Online] available at: <http://humas.bandung.go.id/humas/layanan/2018-10-23/berburu-ilmu-ke-kota-bandung-wakil-wali-kota-palop> [Diakses 4 Juli 2019].

KBBI. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. [Online] available at: <https://kbbi.web.id/sektor.html> [Diakses 8 Juni 2019].